

## **ABSTRAK**

Penelitian ini menganalisis kehidupan dan peran politik Sutan Sjahrir dalam perspektif teori Kontrak Sosial yang dikemukakan oleh filsuf modern Jean-Jacques Rousseau, serta menilai relevansinya bagi upaya implementasi politik bersih di Indonesia saat ini. Kajian ini merupakan bagian dari studi filsafat politik modern yang mencoba membaca praktik politik melalui lensa pemikiran filosofis tentang negara, kekuasaan, dan kontrak sosial. Permasalahan yang diangkat meliputi bagaimana kehidupan dan pemikiran politik Sutan Sjahrir, bagaimana konsep kontrak sosial menurut Rousseau, serta bagaimana pemikiran politik Sutan Sjahrir dapat dipahami dalam kerangka teori kontrak sosial tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan menelaah sumber-sumber primer dan sekunder terkait Sutan Sjahrir dan teori kontrak sosial Rousseau.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sutan Sjahrir adalah sosok politikus dan pemikir yang memperjuangkan kebebasan, tanggung jawab, serta etika politik yang berlandaskan pada kepentingan rakyat. Dalam perspektif filsafat politik, pemikiran Sutan Sjahrir mencerminkan semangat otonomi moral dan tanggung jawab kolektif sebagaimana diidealkan oleh Rousseau. Dia menolak kekuasaan yang diperjuangkan untuk kepentingan pribadi dan menekankan pentingnya pendidikan politik rakyat sebagai dasar demokrasi yang sejati. Sementara itu, teori kontrak sosial Rousseau menegaskan bahwa kekuasaan negara harus lahir dari kehendak umum dan dijalankan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama, menjadikan prinsip moral sebagai fondasi utama dalam struktur kekuasaan.

Analisis terhadap kedua pemikiran ini menunjukkan bahwa kehidupan politik Sutan Sjahrir memperkaya dan melengkapi teori kontrak sosial Rousseau dalam ranah praksis, dengan menekankan pentingnya moralitas, kehendak umum, dan pengabdian tanpa pamrih dalam berpolitik. Dalam konteks perpolitikan Indonesia saat ini, di tengah berbagai tantangan seperti korupsi, proseduralisme demokrasi, dan pragmatisme kekuasaan, warisan pemikiran ini menunjukkan relevansi yang kuat sebagai pijakan etis-filosofis. Upaya membangun politik yang

bersih, adil, dan demokratis membutuhkan pemimpin-pemimpin yang berkarakter, pendidikan politik rakyat yang kritis, serta sistem politik yang berpijak pada prinsip kehendak umum dan keadilan sosial. Dengan menggali dan merefleksikan warisan filsafat politik modern ini, Indonesia dapat memperkuat fondasi demokrasi substantif demi terwujudnya kesejahteraan seluruh rakyat.



***ABSTRACT***

This study analyzes the life and political role of Sutan Sjahrir through the lens of the Social Contract theory proposed by the modern philosopher Jean-Jacques Rousseau, and assesses its relevance to current efforts to promote clean politics in Indonesia. The research forms part of modern political philosophy, aiming to interpret political practice through philosophical perspectives on the state, power, and the social contract. The issues explored include Sjahrir's life and political thought, Rousseau's concept of the social contract, and how Sjahrir's political ideas can be understood within the framework of that theory.

The result shows that Sutan Sjahrir was a politician and thinker who fought for freedom, responsibility, and political ethics in the interests of the people. From the perspective of political philosophy, Sutan Sjahrir's role and political thoughts reflect the spirit of moral autonomy and collective responsibility as idealized by Rousseau. He rejected the pursuit of power for personal interest and emphasized the importance of political education for the people as the foundation of genuine democracy. Meanwhile, Rousseau's social contract theory affirms that state authority must originate from the general will and be exercised to promote the common good, with moral principles serving as the fundamental basis of political power.

The analysis of both perspectives shows that Sutan Sjahrir's political life enriches and extends Rousseau's social contract theory in practical terms, by emphasizing the importance of morality, the general will, and selfless dedication in politics. Efforts to build clean, just and democratic politics require leaders of integrity, critical political education for public, and a political system grounded in the principles of the general will and social justice. By exploring and reflecting on the legacy of modern political philosophy, Indonesia can strengthen the foundations of substantive democracy in pursuit of the welfare of all its citizens.